

Analisis Determinasi Tuingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten

Mita Adinda¹, Sarah Ghania^{2*}

¹ 2110115074@mahasiswa.upnvj.ac.id, ² sarahghania@upnvj.ac.id

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

**Penulis Korespondensi*

Diterima: 28 July 2026

Direvisi : 4 Agustus 2026

Diterbitkan : 31 Agustus 2026

Abstract

Open unemployment remains a strategic issue in Banten Province despite the region's relatively positive economic growth. This condition indicates a possible mismatch between economic expansion, the improvement of human capital quality, and the effectiveness of employment policies implemented at the regional level. This study aims to analyze the influence of the Regency/City Minimum Wage (UMK), Average Length of Schooling (RLS), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the Open Unemployment Rate (TPT) in Banten Province during the period 2010–2024. The results show that the minimum wage has a negative and significant effect on the open unemployment rate, indicating that an increase in UMK contributes to reducing unemployment through improved welfare and labor absorption. The RLS variable has a negative but insignificant effect, suggesting that the increase in educational attainment has not yet been optimally aligned with labor market needs. Meanwhile, GRDP has a positive and insignificant effect on unemployment, reflecting the phenomenon of jobless growth, where economic growth is not fully accompanied by an expansion in employment opportunities. Overall, the findings emphasize the importance of integrating education, labor, and economic development policies to strengthen human capital quality and expand employment opportunities in a sustainable manner.

Keywords : UMK; RLS; PDRB; Open Unemployment Rate; Panel Data

Abstrak

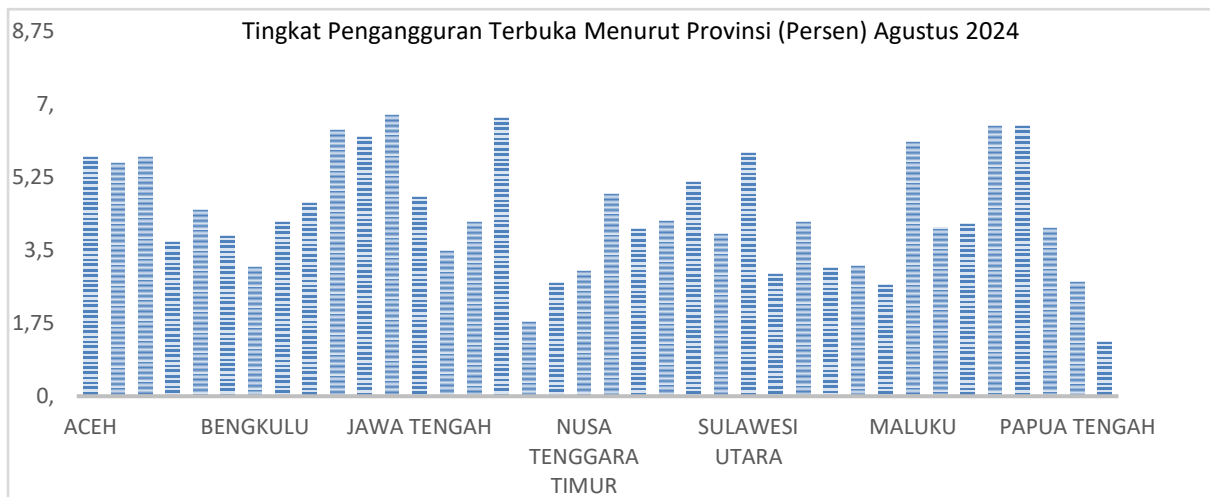
Fenomena pengangguran terbuka masih menjadi isu strategis di Provinsi Banten meskipun pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada periode 2010–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, sehingga peningkatan upah minimum terbukti mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Variabel RLS berpengaruh negatif namun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap TPT, yang menunjukkan adanya fenomena jobless growth, di mana pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pembangunan ekonomi daerah agar mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan.

Kata kunci : UMK; RLS; PDRB; Tingkat Pengangguran Terbuka; Panel Data; Banten

1. PENDAHULUAN

Pengangguran terbuka menjadi masih menjadi masalah fundamental dalam perekonomian yang dialami oleh banyak negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan cerminan ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. (Irawan, 2022). Angka tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan adanya inefisiensi alokasi sumber daya dan berimplikasi pada penurunan output ekonomi serta potensi ketidakstabilan sosial (Jubaeda & Amelia, 2021).

Gambar 1. Grafik TPT berdasarkan provinsi di Indonesia 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 1 dari 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi meskipun mengalami tren penurunan dalam beberap tahun terkahir. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa TPT di Provinsi Banten turun dari 7.02 persen pada Februari 2024 menjadi 6.64 persen pada Februari 2025, namun angka ini tetap berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan tantangan dalam menyerap angkatan kerja di tengah pertumbuhan ekonomi regional. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam pasar tenaga kerja, permasalahan pengangguran di Provinsi Banten masih relatif tinggi dan membutuhkan penanganan yang serius.

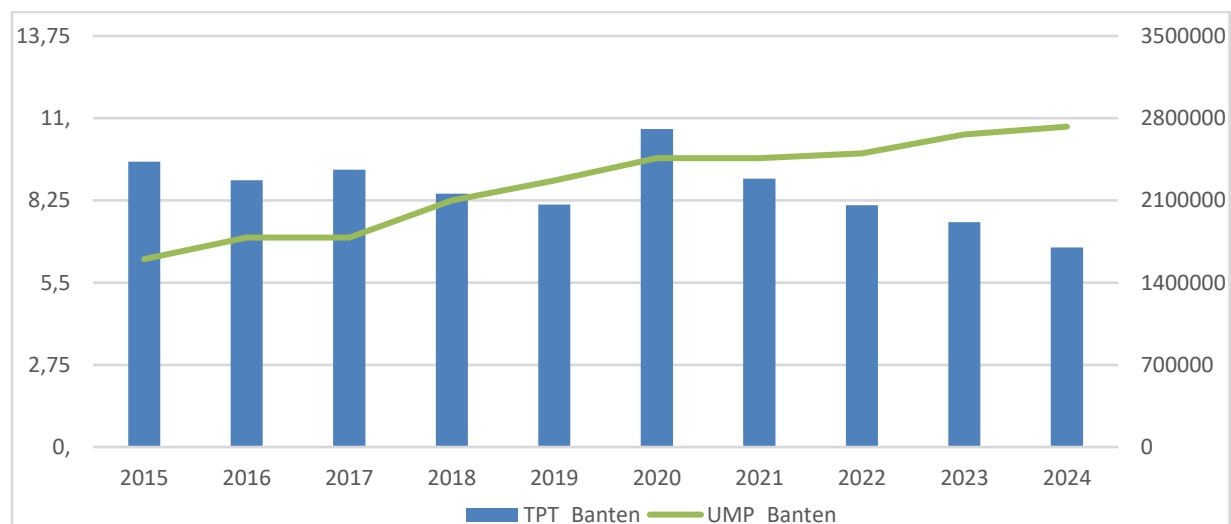
Pengangguran terbuka merupakan kondisi dimana seseorang yang telah memasuki usia angkatan kerja namun tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang tidak sedang bekerja karena merasa tidak adanya kesempatan kerja (Qamariyah et al., 2022). Menurut Attallah et al., (2024), kondisi ini membawa dampak negatif yang signifikan pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja, serta dapat berakibat pada masalah sosial yang lebih besar seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Meskipun secara nasional tren angka penganggurana terbuka cenderung menurun, realitas di tingkat regional menunjukkan variasi yang signifikan. Salah satu daerah dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, yang menarik perhatian adalah Provinsi Banten.

Menurut *Directory of Manufacturing Industri in Banten Province 2025* yang dirilis oleh BPS Provinsi Banten, pada tahun 2025 terdapat 3.397 unit perusahaan industry pengolahan berskala menengah dan besar yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten. Jumlah ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten adalah salah satu provinsi dengan konsentrasi industry terbesar di Pulau Jawa, terutama di sektor manufaktur, sehingga menjadikan basis penting yang mempengaruhi pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Sektor industri

pengolahan juga menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Banten dengan kontribusi pertumbuhan mencapai 5.81 persen pada triwulan pertama tahun 2024. Pratiwi dan Wibowo (2023) menjelaskan bahwa perkembangan industri besar dan menengah di Provinsi Banten tidak secara signifikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga pertumbuhan sektor industri belum sepenuhnya berdampak pada penurunan tingkat pengangguran.

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tergolong relatif tinggi di Indonesia. Kebijakan UMK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun di sisi lain dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Kondisi ini berpotensi menurunkan permintaan tenaga kerja, khususnya pada sektor industri yang sensitive terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. Dalam penelitian Mediansyah dan Hermanto (2024) upah minimum memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, terutama ketika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan ekspansi lapangan kerja.

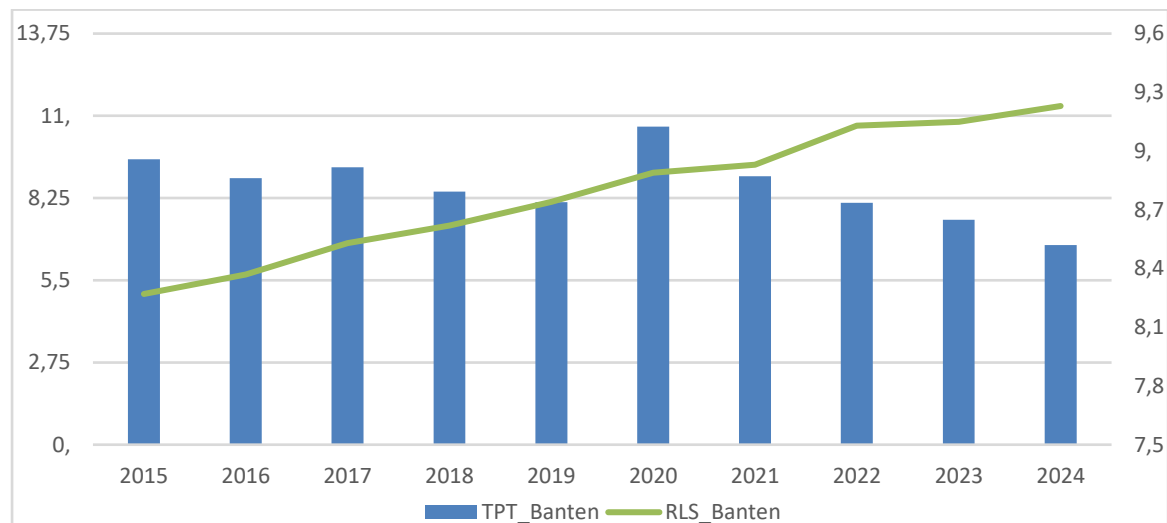
Gambar 2. Grafik UMP terhadap TPT di Provinsi Banten 2015-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa sepanjang 2015 – 2019, UMK Banten mengalami peningkatan, akan tetapi TPT masih berada pada kisaran 9 -9 .5 persen, yang menandakan bahwa kenaikan upah belum cukup kuat untuk mendorong penurunan pengangguran. Wahyudi (2019) yang menyatakan bahwa kenaikan UMP dapat menciptakan tekanan biaya (*labor cost pressure*), sehingga perusahaan menahan ekspansi atau bahkan mengurangi perekrutan. Pada tahun 2020, UMP Banten kembali meningkat, namun TPT melonjak hingga 10,5 persen, terutama disebabkan oleh gangguan ekonomi akibat pandemi. Pada fase pemulihan, yakni tahun 2021-2024, TPT berangsur turun dari 8,9 persen menjadi 6,7 persen, bersamaan dengan peningkatan UMP. Hal ini menunjukkan bahwa setelah beban pandemi mulai mereda, kenaikan UMP tidak lagi menjadi hambatan utama dalam penyerapan tenaga kerja. Zulkarnain (2022) juga menegaskan bahwa pengaruh UMK terhadap pengangguran baru terlihat signifikan jika kondisi ekonomi daerah berada dalam tekanan biaya tinggi, seperti di Banten. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan UMK tidak selalau menurunkan pengangguran, karena perusahaan mungkin melakukan efisiensi tenaga kerja akibat upah meningkat. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi tenaga kerja yang menyatakan bahwa upah minimum bias memicu pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan (Mankiw, 2019).

Gambar 3. Grafik RLS terhadap TPT di Provinsi Banten



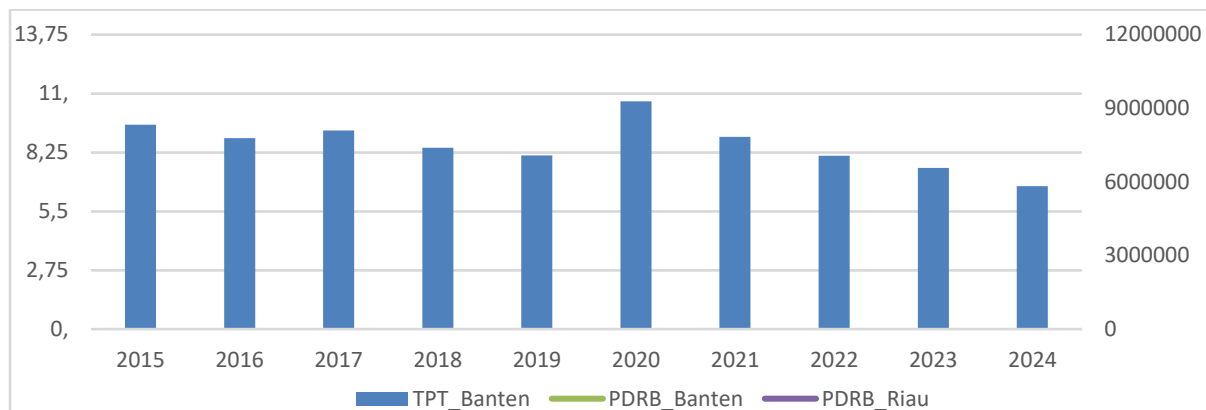
Sumber Badan Pusat Statistik Banten, (2024)

Selain upah minimum kabupaten/kota, faktor lainnya yang dianggap juga berpengaruh terhadap TPT adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada gambar 4 RLS di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2015-2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan serta meningkatnya kemampuan penduduk untuk menyelesaikan jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Di sisi lain, peningkatan RLS tidak secara langsung berkorelasi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada kasus Banten, peningkatan RLS dari sekitar 7,8 tahun pada 2015 menjadi mendekati 9,2 tahun pada 2024 tidak diikuti oleh penurunan signifikan pada TPT. Bahkan, beberapa tahun seperti 2020 menunjukkan lonjakan pengangguran meskipun RLS terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pendidikan belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Menurut Todaro dan Smith (2021), kondisi tersebut lazim terjadi pada daerah dengan struktur industri padat karya yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan otomasi, sehingga peningkatan kualitas tenaga kerja tidak selalu langsung menghasilkan peluang kerja baru.

Menurut Rahman (2022), semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah. Sebagaimana hasil penelitian Fauzi & Amelia (2021), rata-rata lama sekolah tidak hanya menurunkan pengangguran secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan RLS juga merupakan indikator penting kualitas sumber daya manusia, namun efektivitasnya dalam menurunkan TPT ditentukan oleh kecocokan antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan industri setempat (Simanjuntak, 2020).

PDRB juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan PDRB yang dihasilkan oleh sektor pada modal seperti industri dengan teknologi tinggi, umumnya menyerap lebih sedikit tenaga kerja dibanding sektor padat karya seperti perdagangan atau jasa. Dalam kondisi ini meskipun PDRB meningkat, pertumbuhan lapangan kerja bisa stagnan atau hanya sedikit meningkat (Rachmawati & Dhitara, 2021). Namun menurut Sang & Utama (2025), PDRB memiliki peran penting dalam kemampuan daerah menyerap tenaga kerja, di mana pertumbuhan output berhubungan dengan peningkatan kesempatan kerja.

Gambar 4. Grafik PDRB terhadap TPT di Provinsi Banten dan Riau



Sumber Badan Pusat Statistik Banten, 2025

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi TPT adalah PDRB. Berdasarkan gambar 1.5, TPT dan PDRB pada Provinsi Banten, terlihat bahwa Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi regional. Lonjakan TPT pada tahun 2020 sangat konsisten dengan temuan studi yang menunjukkan kontraksi ekonomi dan perubahan struktural akibat pandemi. Akita & Alisjahbana (2023) mengatakan bahwa pandemi mendorong perubahan struktural di perekonomian regional dan kesenjangan pendapatan wilayah, yang dipicu oleh penurunan aktivitas di sektor-sektor produktif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Pengangguran Keynesian

Teori Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (Keynes, 1936) menjelaskan bahwa pengangguran disebabkan oleh kurangnya permintaan gregat dalam perekonomian. Keynes menolak asumsi ekonomi klasik bahwa pasar tenaga kerja secara otomatis mencapai keseimbangan melalui fleksibilitas upah. Menurut Keynes, penurunan upah yang terjadi secara luas justru menurunkan daya beli masyarakat, melemahkan konsumsi, dan pada akhirnya menurunkan permintaan agregat sehingga pengangguran meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam melakukan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal, termasuk penetapan upah minimum, peningkatan belanja pemerintah, dan intervensi lainnya guna meningkatkan permintaan agregat dan memperluas kesempatan kerja (Mankiw, 2012).

Perkembangan teori Keynesian kemudian melahirkan aliran Neo-Keynesian dan New Keynesian. Ekonomi Neo-Keynesian, yang dijelaskan oleh Samuelson dan Solow (1960), menekankan bahwa rigiditas harga dan upah menyebabkan pasar tenaga kerja tidak mudah mencapai keseimbangan sehingga pengangguran dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Disisi lain, pendekatan New Keynesian memperkaya penjelasan dengan menyatakan bahwa penurunan jumlah uang beredar akan menyebabkan masyarakat mengurangi pengeluarannya sehingga permintaan terhadap barang dan jasa ikut menurun. Ketidafleksibelan harga dan upah yang tidak menyesuaikan secara cepat mengakibatkan penurunan permintaan tersebut berdampak pada berkurangnya tingkat produksi, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (Priyono & Ismail Zaenudin, 2012). Teori ini juga menegaskan bahwa kondisi kesempatan kerja penuh (full employment) tidak dapat diwujudkan melalui penetapan tingkat upah yang rendah.

Dalam konteks variabel penelitian, hubungan antara teori Keynesian dan tingkat pengangguran terbuka (TPT), upah minimum, pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah/RLS),

serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijelaskan melalui mekanisme permintaan agregat dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Keynes, ketika permintaan agregat meningkat, perusahaan akan meningkatkan produksi dan menambah tenaga kerja sehingga TPT menurun. Sebaliknya, ketika permintaan agregat melemah, produksi menurun dan TPT meningkat (Blanchard & Johnson, 2013). UMP dalam pandangan Keynesian dipandang sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan upah minimum yang proporsional dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, mendorong permintaan agregat, meningkatkan produksi, dan menurunkan TPT. Pandangan ini sejalan dengan model New Keynesian yang menekankan rigiditas upah sebagai penghalang tercapainya penyesuaian pasar tenaga kerja.

RLS dikaitkan dengan teori Keynesian kontemporer, yang menekankan pentingnya kualitas SDM dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ekonomi. Karyawan dengan pendidikan lebih tinggi lebih mungkin terintegrasi ke dalam angkatan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi (Todaro et al, 2020). Peningkatan pendidikan juga dapat mendorong pendapatan dan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan permintaan agregat. PDRB, sebagai indikator output ekonomi daerah, secara langsung berhubungan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dalam kerangka Keynesian, ketika PDRB meningkat, hal tersebut mencerminkan kenaikan aktivitas produksi dan permintaan agregat sehingga perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja, yang berujung pada penurunan TPT (Case et al, 2017). Sebaliknya, penurunan PDRB menunjukkan melemahnya permintaan dan meningkatkan tingkat pengangguran.

Dengan demikian, baik teori Keynesian klasik maupun perkembangannya pada Neo-Keynesian dan New Keynesian menegaskan bahwa dinamika pengangguran sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, kebijakan pengupahan, kualitas tenaga kerja, dan kondisi output ekonomi. Oleh karena itu, variabel UMP, RLS, dan PDRB sangat relevan dalam menjelaskan variasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan perspektif Keynesian.

Definisi Upah Minimum

Salah satu bidang penting dalam ekonomi tenaga kerja yang mempelajari bagaimana norma upah memengaruhi pasar tenaga kerja dan perekonomian adalah teori upah minimum. Tingkat upah terendah yang secara hukum wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan untuk menjamin kualitas hidup yang layak dikenal sebagai upah minimum. Dalam literatur ekonomi, pembahasan mengenai upah minimum berkembang melalui beberapa aliran pemikiran besar, yaitu teori Neoklasik, teori Keynesian, dan teori Upah Efisiensi.

Menurut pandangan Neoklasik, pasar tenaga kerja bekerja berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Upah merupakan harga tenaga kerja yang akan menyesuaikan menuju titik keseimbangan. Penetapan upah minimum di atas tingkat keseimbangan ($W_m > W_e$) dianggap menciptakan distorsi karena meningkatkan biaya tenaga kerja, sehingga perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap. "Kondisi ini berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) karena jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pasar" (Ehrenberg & Smith, 2017; Borjas, 2016). Dengan demikian, dalam kerangka Neoklasik, kenaikan upah minimum yang terlalu agresif cenderung meningkatkan pengangguran.

Berbeda dengan pandangan tersebut, teori Keynesian menekankan bahwa pengangguran terutama disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat, bukan karena fleksibilitas upah. Keynes (1936) menyatakan bahwa upah nominal cenderung bersifat "*sticky downward*," sehingga penyesuaian upah sebagai mekanisme pemulihan pasar tidak realistis. Dalam pendekatan Keynesian modern, kenaikan upah minimum dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya beli pekerja berpendapatan rendah, sehingga mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama permintaan agregat. Peningkatan konsumsi tersebut

dapat mendorong pertumbuhan output daerah (PDRB) dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga secara tidak langsung menurunkan TPT (Snowdon & Vane, 2005). Dengan demikian, teori Keynesian memberikan perspektif bahwa upah minimum berpotensi positif terhadap perekonomian apabila mampu meningkatkan permintaan efektif.

Teori ini berkembang lebih lanjut melalui pendekatan Upah Efisiensi, yang menegaskan bahwa perusahaan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pemberian upah yang lebih tinggi daripada tingkat keseimbangan. Upah yang lebih tinggi mendorong pekerja menjadi lebih termotivasi, menurunkan tingkat turnover, dan mengurangi kecenderungan shirking. Dalam model Shapiro–Stiglitz (1984), upah lebih tinggi dianggap sebagai alat disiplin yang mendorong peningkatan kualitas kinerja karyawan. Dengan demikian, dalam konteks pasar tenaga kerja modern, upah minimum tidak selalu berdampak negatif, bahkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja apabila diimbangi dengan produktivitas yang meningkat.

Dalam kaitannya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), ketiga teori ini memberikan pemahaman yang saling melengkapi. Perspektif Neoklasik menekankan risiko peningkatan pengangguran apabila upah minimum lebih tinggi dari produktivitas marginal tenaga kerja. Namun, dalam kerangka Keynesian dan upah efisiensi, kenaikan upah minimum justru dapat mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan permintaan agregat dan produktivitas. Dampak empirisnya sangat bergantung pada kondisi struktural suatu daerah, termasuk struktur industri dan elastisitas permintaan tenaga kerja.

Selain itu, RLS dan upah minimum saling berkaitan. Upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan yang diharapkan dari pendidikan, yang dapat memotivasi orang untuk melanjutkan pendidikan karena kemungkinan mendapatkan lebih banyak uang. Namun, dalam situasi tertentu, upah minimum yang terlalu tinggi dapat mendorong kaum muda untuk putus sekolah dan memasuki dunia kerja lebih awal. Card dan Krueger (1995) menunjukkan bahwa efek upah minimum terhadap pendidikan bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh peluang kerja lokal.

Sementara itu, hubungan antara upah minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijelaskan melalui peran upah sebagai komponen daya beli masyarakat. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan konsumsi, yang merupakan komponen terbesar dalam PDRB, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mankiw, 2019). Namun, jika kenaikan upah tidak diiringi produktivitas dan efisiensi industri, peningkatan biaya produksi dapat menurunkan investasi dan output, sehingga memberi dampak negatif terhadap PDRB.

Secara keseluruhan, teori upah minimum dalam literatur ekonomi menunjukkan bahwa dampaknya terhadap TPT, RLS, dan PDRB tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada keseimbangan antara produktivitas, struktur ekonomi daerah, dan dinamika permintaan agregat. Dengan memahami perkembangan teori Neoklasik, Keynesian, hingga Upah Efisiensi, penelitian dapat mengidentifikasi posisi teoritis yang paling relevan dengan kondisi empiris wilayah penelitian.

Teori Human Capital

Istilah "manusia" dan "modal" digabungkan untuk membentuk konsep "modal manusia". Faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk dan jasa tanpa berkurang selama proses manufaktur dikenal sebagai modal. Berdasarkan pengertian tersebut, manusia dalam kerangka human capital dipandang sebagai bentuk modal, serupa dengan mesin dan teknologi, yang berperan dalam kegiatan produksi (Nurkholis, 2020).

Gary Becker dan Theodore Schultz menciptakan gagasan modal manusia, menekankan nilai pengeluaran uang untuk pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan produktivitas individu. Becker berpendapat bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang mampu memberikan pengembalian dalam bentuk peningkatan keterampilan dan

produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perbaikan kualitas hidup serta peningkatan pendapatan individu.

Dalam perspektif teori modal manusia, pendidikan dipandang sebagai investasi yang dilakukan individu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan kualitas SDM tersebut selanjutnya berdampak pada naiknya produktivitas kerja dan pendapatan yang diterima individu (Adriani, 2019). Max Weber juga mengemukakan bahwa di masyarakat modern, kredensial pendidikan seperti gelar dan diploma dapat dipertukarkan di pasar untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan status sosial, terutama bagi mereka yang tidak memiliki properti. Tingkat pendidikan berfungsi sebagai sinyal sosial yang memberi tahu pasar tenaga kerja agen mana yang telah mengumpulkan komposisi modal terbesar yang dituntut oleh pasar. Praktik ini melanggengkan hierarki kelas dan ketidaksetaraan, di mana kelompok-kelompok dengan modal yang lebih sederhana terpinggirkan (Aziz, 2015).

Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan output atau pendapatan nasional suatu negara yang dipengaruhi oleh bertambahnya tingkat tabungan dan jumlah penduduk (Putra, 2021). Tingkat pertumbuhan ekonomi umumnya diukur melalui perbandingan nilai GDP atau PDRB antara satu periode dengan periode sebelumnya.

Teori Solow menjelaskan bahwa laju pertumbuhan output ditentukan oleh faktor eksogen berupa kemajuan teknologi. Model Solow-Swan menekankan pemanfaatan teknologi secara efisien dalam proses produksi serta adanya kecenderungan penurunan hasil marginal (diminishing returns) terhadap akumulasi modal dan tenaga kerja (Amalia et al., 2016). Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi berupa modal fisik, tenaga kerja, serta teknologi yang berperan sebagai variabel eksogen dan tercermin sebagai residual. Teknologi mencerminkan tingkat efisiensi dalam mengombinasikan modal dan tenaga kerja, serta merepresentasikan pengetahuan mengenai cara memproduksi barang dan jasa secara lebih efektif (Nurwanda & Rifai, 2018). Keunggulan teori ini terletak pada kemampuannya menjelaskan keseimbangan jangka panjang perekonomian serta peran kemajuan teknologi dalam distribusi pendapatan (Amalia et al., 2016).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Untuk memungkinkan pengembangan hasil penelitian, populasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai semua item atau individu yang memenuhi kriteria dan ciri-ciri tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dievaluasi. Populasi juga dapat diartikan sebagai seluruh unit analisis yang menjadi fokus kajian penelitian (Subhaktiyasa, 2024). Dalam penelitian ini populasi penelitiannya yaitu Indonesia. Lalu dalam penelitian ini digunakan metode pengambilan sampel jenuh, yang mencakup setiap anggota populasi. Tiga variabel independen UMK, RLS, dan PDB dan satu variabel dependen, TPT, membentuk sampel penelitian. Semua kabupaten dan kota di provinsi Banten dan Riau termasuk dalam data penelitian, dan periode pengamatan berlangsung selama 15 tahun, dari tahun 2010 hingga 2024.

Penggunaan teknik sampling jenuh dipilih karena jumlah seluruh unit populasi masih memungkinkan untuk dijadikan sampel. Teknik ini memungkinkan untuk menganalisis seluruh data yang tersedia secara menyeluruh, sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif, akurat, dan tidak mengandung bias akibat pemilihan sampel. Data diambil Badan Pusat Statistik sehingga dapat langsung di analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan yang kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft Excel 2021 untuk mempercepat pemrosesan data perangkat lunak Stata 17. Untuk mengumpulkan data, tinjauan pustaka juga dilakukan. Berbagai sumber literatur, termasuk publikasi akademis, buku, situs web, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan isu penelitian, dikumpulkan dan digunakan sebagai dasar dan sumber untuk studi.

Teknik Analisis Data

Pendekatan data panel digunakan dalam studi ini. Penggabungan data lintas wilayah (*cross section*) dan runtut waktu (*time series*) memungkinkan pengamatan perilaku unit analisis selama beberapa periode. Melalui pendekatan ini, data panel digunakan untuk menganalisis perbedaan dampak UMK, RLS, dan PDRB terhadap TPT pada kabupaten/kota di Banten. Berdasarkan model yang dipilih, diperoleh analisis regresi sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMK_{it} + \beta_2 RLS_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

<i>TPT</i>	: Tingkat Pengangguran Terbuka
<i>i</i>	: Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
<i>t</i>	: Waktu (2010-2024)
<i>UMK</i>	: Upah Minimum Kabupaten/Kota
<i>RLS</i>	: Rata-Rata Lama Sekolah
<i>PDRB</i>	: Produk Domestik Regional Bruto
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien Regresi
ε	: Error Term (Faktor Pengganggu)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dievaluasi dengan menggunakan uji Skewness dan Kurtosis Test. Jika nilai probabilitas nya lebih besar dari alpha (0,05), maka data residual dianggap terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (0,05), maka data residual tidak terdistribusi secara normal (Basuki & Prawoto, 2016). Pendekatan *Shapiro Swilk* digunakan dalam uji normalitas pada penelitian ini. Hasil menunjukkan nilai Prob > z sebesar 0.08044 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. ini memperlihatkan data residual terdistribusi normal dan dapat digunakan untuk analisis regresi tambahan karena tidak mengganggu stabilitas koefisien yang diestimasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memastikan tidak ada hubungan kuat antar variabel independen dalam model regresi yang dapat merusak estimasi. Deteksi dilakukan dengan melihat nilai

VIF < (10) dan tolerance > (0,10). Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai rata-rata VIF adalah 1.60 dan nilai VIF untuk UMK, RLS, dan PDRB masing-masing adalah 1.76, 1.55, dan 1.47. Tidak ada multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai jauh di bawah ambang batas penting yaitu 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji konsistensi varian error antar pengamatan untuk memastikan estimasi regresi akurat (Ghozali, 2017). Pada penelitian ini, uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Breusch-Pagan/Cook-Weisberg, masalah heteroskedastisitas ada jika $\text{Prob} > \chi^2 < \alpha$ 0,05. Hasil uji Breusch-Pagan menunjukkan nilai LM sebesar 19.0 dan $\text{Prob} > \chi^2 = 0.00000 < (0.05)$, mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, Peneliti menggunakan metode robust standard errors untuk menghasilkan standar error yang lebih andal dan valid.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil didapati nilai wooldridge sebesar 0.00047. Nilai tersebut < (0.05). Hal ini menunjukkan adanya masalah autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak bebas dari autokorelasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Peneliti menggunakan metode robust standard errors untuk mengatasi kedua permasalahan asumsi klasik untuk menghasilkan standar error yang lebih andal dan valid. Meskipun terdapat permasalahan pada Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

Teknik Penentuan Model

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih baik antara model Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) dalam analisis regresi data panel. Ketika nilai probabilitas < α (0.05), berarti model FEM lebih baik dibandingkan model CEM. Apabila nilai probabilitas lebih > α (0.05) model CEM lebih baik daripada model FEM.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effect Test	Prob > F
<i>F</i> (7.109)	11.64
<i>Prob > F</i>	0.000

Sumber: Data diolah, Stata 17

Dari Tabel 5, terlihat bahwa hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar (0.000) > α (0.05), Berarti model terbaik pada Uji Chow yakni *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dengan Random Effect Model (REM). Ketika nilai probabilitas < α (0.05), berarti model FEM lebih baik dibandingkan model REM. Apabila nilai probabilitas lebih > α (0.05) model REM lebih baik daripada model FEM.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Effect Test	Prob>chi2
<i>Chi (3)</i>	7.32
<i>Prob > chi2</i>	0.0625

Sumber: Data diolah, Stata-17

Dari Tabel 6, terlihat bahwa hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar (0.0625) > alpha (0.05), Berarti model terbaik pada Uji Hausman yakni *Random Effect Model*.

Uji Lagrange Multiplier

Uji ini dilakukan untuk membandingkan mana model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Jika nilai probabilitas < dari alpha (0,05), maka model estimasi REM dianggap tepat untuk digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas > dari 0,05, maka model CEM dianggap lebih sesuai untuk digunakan dalam pengujian.

Tabel 3. Hasil Uji *Lagrange Multiplier (LM)*

Chibar2(01)	92.20
Prob > chibar2	0.0000

Sumber: Hasil olah data Stata-17

Dari Tabel 7 diatas , terlihat bahwa hasil Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan nilai probabilitas sebesar (0.0000)> alpha (0.05), Berarti model terbaik pada Uji LM yakni *Random Effect Model*.

Interprestasi Model

Berdasar pada hasil uji penentuan model yang telah dilakukan, didapati bahwa REM adalah model yang paling reliabel digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Regresi *Random Effect Model*

IPM	Regression Model					
	Random Effect Model					
	Coef.	Std. Err	z	P> [z]	[95% conf. interval]	
UMK	-3.313399	0.4496892	-7.37	0.000	-4.194774	-2.432024
RLS	-0.04404551	0.1943105	-2.27	0.023	-0.8212967	0.0596135
PDRB	0.9047403	0.4330104	2.09	0.037	-0.562548	1.753426
_CONS	52.599	5.713523	9.21	0.000	41.4016	63.7982

Sumber: Data diolah, Stata 17

Meskipun REM terpilih sebagai model yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat indikasi permasalahan asumsi klasik, yaitu pada heteroskedastisitas dan autokorelasi, yang dapat memengaruhi validitas hasil estimasi. Meskipun dari tabel hasil regresi tidak secara langsung menunjukkan keberadaan heteroskedastisitas dan autokorelasi, kedua masalah terdeteksi melalui pengujian asumsi klasik. Indikasi adanya pelanggaran terhadap asumsi- asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi menunjukkan bahwa hasil estimasi pada model REM perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk mengatasi permasalahan ini, peneliti menggunakan pendekatan robust standard errors sebagai metode yang sesuai untuk menghasilkan estimasi yang valid dan dapat diandalkan, meskipun terdapat pelanggaran terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Robust Standard Error

TPT	Regression Model					
	Random Effect Model					
	Coef.	Robust Std.Err	z	P> [z]	[95% conf. interval]	
UMK	-3.313399	0.4719894	-7.02	0.000	-4.238481	-2.388317
RLS	-0.04404551	0.3475891	-1.27	0.0205	-1.121717	0.2408071
PDRB	0.9047403	0.4790751	1.89	0.059	-0.342298	21.84371
_CONS	52.599	8.029521	6.55	0.000	36.586233	68.33747

Sumber: Data diolah, Stata 17

Dilihat pada tabel diatas, berdasarkan hasil regresi robust diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$TPT_{it} = 52.5999 - 3.313399UMK_{it} - 0.4404551RLS_{it} + 0.9047403PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas menunjukkan:

- Nilai konstanta pada persamaan regresi senilai 52.5999, artinya disaat variabel UMK, RLS, PDRB di Provinsi Banten, maka TPT bernilai 52.5999.
- Koefisien UMK di Provinsi Banten adalah -3.313399, yang berarti bahwa dengan asumsi semua variabel independen tetap konstan, kenaikan satu unit UMK akan mengakibatkan penurunan TPT sebesar 3.313399 di Banten.
- Koefisien RLS di Provinsi Banten adalah -0.4404551, yang berarti bahwa, dengan asumsi semua variabel independen tetap konstan, setiap kenaikan satu unit RLS akan mengakibatkan penurunan TPT sebesar 0.4404551.
- Koefisien PDRB Provinsi Banten adalah 0.9047403, yang menunjukkan bahwa dengan asumsi semua variabel independen tetap konstan, kenaikan satu unit PDRB diikuti oleh peningkatan TPT sebesar 0.9047403.

Uji Signifikansi

Uji Z

Uji z bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai z-hitung terhadap z-tabel (1,96 pada

tingkat signifikansi 5%) atau melalui probabilitas (p-value). Jika p-value < 0,05 atau z-hitung > 1,96, maka variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika p-value > 0,05 atau z-hitung $\leq 1,96$, variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dengan z-tabel sebesar 1,96, sesuai penghitungan $Z_{1-\alpha/2} = Z_{0.975}$.

Berikut merupakan analisis dari pengujian z:

- Nilai z sebesar -7.02 dan nilai p sebesar 0.000 pada temuan estimasi memperlihatkan variabel UMK di Banten memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap TPT.
- Dengan nilai z sebesar -1.27 dan nilai p sebesar 0.205, temuan estimasi memperlihatkan variabel RLS di Banten memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap TPT.
- Nilai z sebesar 1.59 dan nilai p sebesar 0.059, temuan estimasi ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap TPT.

Uji Koefisien Determinasi (R-Squared)

Pada model regresi, tingkat kemampuan variabel independen untuk menjelaskan perubahan atau fluktuasi pada variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 adalah angka antara 0 dan 1, di mana nilai yang mendekati 1 memperlihatkan seberapa baik model tersebut menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Within	0.4758
Between	0.1264
Overall	0.3596

Sumber: Data diolah, Stata 17

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Stata-17, nilai overall R-squared dari model regresi adalah 0.4898. Ini mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan 35.96% variasi dalam variabel dependen yaitu TPT, yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini. Dengan kata lain, 48.57% perubahan dalam nilai TPT dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas yang digunakan dalam model ini. Sisanya, yaitu sebesar 12.64%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau faktor-faktor yang bersifat residual.

Analisis Ekonomi dan Pembahasan

Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode 2010-2024. Artinya meskipun terdapat kecenderungan bahwa RLS dapat menurunkan TPT, namun hubungan ini dianggap tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik. Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain mungkin dianggap memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menentukan tingkat penangguran terbuka di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan juga ditolak.

Temuan ini diperkuat dengan Teori Human Capital (Backer) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja sehingga lebih mudah diserap oleh pasar tenaga kerja. Menurut Gina dan Sabar (2025), peningkatan

kualitas pendidikan harus diarahkan pada penguatan kompetensi kerja dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri di tingkat lokal. Integrasi kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, dan pendidikan secara simultan akan meningkatkan efektivitas penurunan pengangguran dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sistem pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat menghasilkan output yang siap kerja, sehingga angkatan kerja yang dimiliki oleh Indonesia mampu dengan pihak asing. Dengan demikian, tingkat pengangguran akan menurun seiring waktu dan tidak lupa juga harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan ekonomi seperti ikut andil dalam perdagangan internasional (Auliya et all, 2022). Menurut Desembriarto hasil tidak signifikan menyatakan bahwa lapangan pekerjaan yang tercipta melalui dinamika perekonomian yang ekspansif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi positif adalah lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja dengan pendidikan yang relatif tidak tinggi. Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Desembriarto (2021) yang mendapatkan hasil variabel RLS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPT. Upaya mendorong tingkat kenyamanan pendidik yang lebih tinggi harus secara konsisten dilaksanakan agar terjadi kenaikan rata-rata lama sekolah. Kenaikan ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tingkat pendidikan di atas SMP di masa yang akan datang. Peningkatan lama sekolah juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang memadai agar penduduk terdidik dapat diterima di lapangan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tinggi

Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode 2010-2024. Artinya meskipun terdapat kecenderungan bahwa RLS dapat menurunkan TPT, namun hubungan ini dianggap tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik. Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain mungkin dianggap memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menentukan tingkat penangguran terbuka di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan juga ditolak.

Temuan ini diperkuat dengan Teori Human Capital (Backer) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja sehingga lebih mudah diserap oleh pasar tenaga kerja. Menurut Gina dan Sabar (2025), peningkatan kualitas pendidikan harus diarahkan pada penguatan kompetensi kerja dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri di tingkat lokal. Integrasi kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, dan pendidikan secara simultan akan meningkatkan efektivitas penurunan pengangguran dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sistem pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat menghasilkan output yang siap kerja, sehingga angkatan kerja yang dimiliki oleh Indonesia mampu dengan pihak asing. Dengan demikian, tingkat pengangguran akan menurun seiring waktu dan tidak lupa juga harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan ekonomi seperti ikut andil dalam perdagangan internasional (Auliya et all, 2022). Menurut Desembriarto hasil tidak signifikan menyatakan bahwa lapangan pekerjaan yang tercipta melalui dinamika perekonomian yang ekspansif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi positif adalah lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja dengan pendidikan yang relatif tidak tinggi.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Desembriarto (2021) yang mendapatkan hasil variabel RLS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPT. Upaya mendorong tingkat kenyamanan pendidik yang lebih tinggi harus secara konsisten dilaksanakan agar terjadi kenaikan rata-rata lama sekolah. Kenaikan ini diharapkan dapat mendorong penciptaan

lapangan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tingkat pendidikan di atas SMP di masa yang akan datang. Peningkatan lama sekolah juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan yang memadai agar penduduk terdidik dapat diterima di lapangan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tinggi. Juliannisa et al., (2025) juga menengaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia memperbesar kerentanan wilayah terhadap permasalahan ekonomi, termasuk keterbatasan akses kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rendahnya rata-rata lama sekolah berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Analisis Pengaruh Produk Domestik Regiona Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten

Berdasarkan pada hasil pengujian yang sudah dilakukan, variabel produk domestik bruto memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap TPT di Provinsi Banten selama periode 2010 hingga 2024. Dengan kata lain peningkatan PDRB justru disertai peningkatan TPT di Provinsi Banten, namun hubungan ini tidak begitu kuat dikarenakan hasil yang tidak signifikan secara statistik. Hal tersebut dapat terjadi ketika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan peningkatan kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang ada disebabkan oleh kegiatan yang padat modal, dimana kegiatan produksi bertujuan untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan tinggi (Mahroji & Anwar, 2020).

Hal ini sejalan dengan Teori Neo Klasik yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi faktor produksi yaitu modal (capital), tenaga kerja (labor), dan teknologi. Dalam teori perusahaan akan memilih kombinasi faktor produksi yang paling efisien untuk memaksimalkan keuntungan. Seiring dengan meningkatnya tingkat teknologi dan akumulasi modal, perusahaan cenderung mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dan menggantikannya dengan teknologi yang lebih produktif. Akibatnya, pertumbuhan output yang tercermin dari peningkatan PDRB tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, meskipun nilai PDRB mengalami kenaikan, jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak bertambah signifikan sehingga tidak mampu mengurangi angka pengangguran secara nyata sehingga dari peningkatan PDRB terhadap pengangguran tidak selalu bersifat langsung. Hal lain dapat dipengaruhi oleh kondisi underemployment yaitu seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Prinsip yang penting mendapat pekerjaan apapun pekerjaannya menyebabkan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang menempuh pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan Industri dan akhirnya tergerus oleh teknologi itu sendiri (Setyaputri et al, 2025).

Hasil penelitian ini didukung oleh penemuan Kurniawan & Samsuddin (2025), bahwa peningkatan PDRB justru tidak disertai peningkatan lapangan kerja, mencerminkan fenomena jobless growth. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan lebih mengandalkan teknologi dibanding tenaga kerja manusia. Dengan demikian, meskipun aktivitas ekonomi meningkat, dampaknya terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif terbatas.

5. SIMPULAN

Berlandaskan Analisa dalam bab sebelumnya dalam menjawab rumusan masalah, didapat Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten selama periode 2010–2024, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

- Kenaikan UMK dinilai mampu memperbaiki daya beli, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendorong aktivitas perekonomian yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Hasil ini selaras dengan perspektif human capital yang menekankan bahwa peningkatan kompensasi dapat diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja.
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara teoretis pendidikan memiliki kontribusi penting dalam menekan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan lama sekolah belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja berpendidikan belum optimal.
 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Peningkatan PDRB tidak secara konsisten diikuti oleh penurunan pengangguran, bahkan cenderung menunjukkan arah yang berlawanan. Kondisi ini mengindikasikan adanya fenomena *jobless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih ditopang sektor padat modal dan teknologi dibandingkan sektor padat karya, sehingga peningkatan output tidak sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, E. O. T., & Asmara, K. (2024). Pagaruh Jumlah Pendudukan, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 37–48.
- Adriani, E. (2019). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(1), 176–183. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86>
- Agus Tri Basuki. (2021). *Draft Buku Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis 2021 Dikompresi*.
- Amalia, K., Kiftiah, M., & Sulistianingsih Evy. (2016). Penerapan Teori Solow-Swan Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Buletin Ilmiah Mat. Stat. dan Terapannya (Bimaster)*, 39–44.
- Attallah, O., Rahmawati, N., Damayanti, P., Monica Sari, A., Zahro, N., Annisa Zahra, I., Ayu Ambarwati, R., Satul Faidhah, Y., & Amalia Permatasari, N. (2024). Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Untuk Mengatasi Dampak PHK Massal dan Meningkatkan Perlindungan Pekerja. In *JURNAL PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN* (Vol. 2, Issue 2).
- Aziz, A. (2015). The operational value of human capital theory and cultural capital theory in social stratification. In *Citizenship, Social and Economics Education* (Vol. 14, Issue 3, pp. 230–241). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/2047173416629510>
- Dezta Maharani, N., & Samsuddin, M. A. (2025). Analisis Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. *JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 72–78.
- Gonzalez, D. (2021). *The Impact of the Minimum Wage on Unemployment*.
- Irawan, F. C. (2022). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2000-2020. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 6, Issue 1).
- Juliannisa, I. A., Rahma, H., Mulatsih, S., & Fauzi, A. (2025). *Regional vulnerability to food insecurity: The case of Indonesia*. Sustainability, 17(11), 4800. <https://doi.org/10.3390/su17114800>

- Jubaeda, E., & Amelia, A. (2021). Identifikasi Faktor Penentu Perubahan Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(3), 141–150. www.jrie.feb.unpas.ac.id
- Kusuma, R., Putri, R., & Mukminatul Hasimi, D. (2025). Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024. *Al-Muzadhir Jurnal Ekonomi Islam*, 07, 1–14. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Latifah, T., Syarif, A. H., & Taufiqurrahman, T. (2025). Analisis Pengaruh Upah dan Tenaga Kerja terhadap Pengangguran di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 6(4), 500–510. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i4.7148>
- Mankiw, N. G. (2012). *Macroeconomics - 8th ed.* 1–674.
- Minarti Indartini, & Mutmainah. (2014). *Analisis DATA KUANTITATIF*.
- Nurkholis, A. (n.d.). *TEORI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*.
- Nurwanda, A., & Rifai, B. (2018). Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi dan Output Potensial Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 177–194. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i3.385>
- Pasama, T., Mahmut, C., & Ekawaty, C. (2023). The Influence of Economic Growth, Inflation, Minimum Wage And Investment On Education Unemployment In Indonesia. In *Proceedings Series on Proceedings of Multidisciplinary Sciences* (Vol. 1, Issue 1).
- Psacharopoulos, G. (1993). *Returns to Investment in Education A Global Update*.
- Putra, R. (2021). Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 3, 1–7.
- Qamariyah, L., P, O. M. W., & Rusgianto, S. (2022a). Pengaruh IPM, Investasi, dan UMP Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2013-2020. *Journal of Economics, Makro Ekonomi*, 1–15.
- Qamariyah, L., P, W. O. M., & Rusgianto, S. (2022b). Pengaruh IPM, Investasi, dan UMP terhadap Pengangguran Terbuka di JawaTimur Tahun 2013-2020. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7, 1–5.
- Ramadan, A., Teguh, A., Roselina, A., Andriastuti, L., & Antriyandarti, E. (2024). The influence of regional minimum wages on unemployment rates in Indonesia multiple linear regression analysis. *Economic Military and Geographically Business Review*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.61511/emagrap.v2i1.2024.872>
- Saputra, R., Salmah, E., & Sujadi, S. (2024). Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Mataram Tahun 2008-2022. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 10(2), 328–337. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i2.535>
- Satrio, B. R., & Utomo, Y. P. (2023). *Analysis of the Influence of Education, Economic Growth, Technological Development, and Wages on Unemployment on Java Island* (Vol. 3).
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Sugianto, Vidriza, U., & Arrafi Juliannisa, I. (2022). Journal of Economics, Finance and Management Studies Factors Causing Unemployment and Strategies for Handling Unemployment Problems in Cibadak District, Lebak Regency, Banten. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 5(Unemployment), 1–10. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i11-07>

- Susanto, J., & Angel, M. P. E. (2024). *The nexus between economic growth and educated unemployment*. www.revecon.ro
- Syarifuddin, & Ibnu Al Saudi. (2022). *Metode Riset Praktis Regresi Berganda Menggunakan SPSS*.
- Yuliansyah. (2020). Hubungan Antara Pengangguran dan Upah Minimum di Indonesia. *Cross-border*, 3(2), 338–345.
- Ramos-Herrera, M. C. (2023). *The effects of minimum wage on unemployment for OECD countries: A panel data analysis. (Economic Research-Ekonomska Istrazivanja)*. *Media Trend*, 14(2), 148–153. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4504>.
- Hannan, Z., Jacob, J., Niam, S. K., Dewi, S., & Nashih, M. (2023). The Effect of Unemployment, Economic Growth, Level of Education on the Human Development Index With Poverty as Mediation. *Jurnal Edunomika*, 8(1), 5– 24.
- Hendrayani. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pd. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. *Jurnal Economix Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Yayasan Pembangunan Manajemen Indonesia Makassar*, 8(1),1–12. <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/14248>.
- Keynes, J. M. (2007). *The general theory of employment, interest, and money (New ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Khairunnisa, I., Yusnita, F., Suryani, I. W., & Panorama, M. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1735–1750. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3557>